

Tata Kelola Ketahanan Pangan Daerah Perbatasan: Sinergi Pemerintah dan Komunitas Lokal di Merauke

Willem Kabuam

Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: wkambuam@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-02-2026
Disetujui 17-02-2026
Diterbitkan 19-02-2026

ABSTRACT

Food security is a strategic issue that requires synergy between the government and the community, particularly in border areas such as Merauke Regency. This study aims to analyze food security governance through collaboration between local governments and communities. The research approach used a qualitative case study method. Data were collected through semi-structured interviews with local government officials, community leaders, and farmer groups, as well as field observations and documentation studies of related policies. The analysis was conducted using an interactive analysis model with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that successful food security governance is strongly influenced by participatory collaboration based on local wisdom. The role of the government through the provision of production facilities, training, and coordination between regional government agencies (OPD) is crucial, although infrastructure and data integration challenges remain. The contribution of local communities, including traditional practices, mutual cooperation systems, and customary food management, is a key factor in maintaining food availability and sustainability. This study recommends strengthening cross-sectoral coordination forums, integrating formal policies with local practices, community empowerment, and developing an integrated food information system as effective strategies for sustainable and inclusive food security in border areas.

Keywords: Food Security; Governance; Synergy between Government and Local Communities; Merauke; Border Region

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola ketahanan pangan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi kebijakan terkait. Analisis dilakukan menggunakan model analisis interaktif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Peran pemerintah melalui penyediaan sarana produksi, pelatihan, dan koordinasi antar-OPD penting, meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan integrasi data. Kontribusi komunitas lokal, termasuk praktik tradisional, sistem gotong royong, dan pengelolaan pangan adat, menjadi faktor kunci dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pangan. Penelitian ini menyarankan penguatan forum koordinasi lintas sektor, integrasi kebijakan formal dengan praktik lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi pangan terpadu sebagai strategi efektif untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.

dan inklusif di wilayah perbatasan.

Katakunci: Ketahanan Pangan; Tata Kelola; Sinergi Pemerintah Dan Komunitas Lokal; Merauke; Daerah Perbatasan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kabuam, W. (2026). Tata Kelola Ketahanan Pangan Daerah Perbatasan: Sinergi Pemerintah dan Komunitas Lokal di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(2), 3356-3368. <https://doi.org/10.63822/jvte6317>

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memiliki dimensi multidisipliner dan berkaitan erat dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Muhaimin and Djaba 2025). Dalam perspektif kebijakan publik, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas konsumsi, serta keberlanjutan sistem produksi dan distribusinya (Mumpuni 2026). Secara global, dinamika perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasok telah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Mariyanto 2025). Kondisi ini menuntut setiap daerah untuk memiliki sistem tata kelola pangan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas produksi wilayah. Dalam konteks wilayah perbatasan, persoalan ketahanan pangan menjadi lebih kompleks karena adanya karakteristik struktural dan geografis yang berbeda dibandingkan wilayah pusat atau perkotaan.

Keterbatasan infrastruktur transportasi, hambatan distribusi logistik, minimnya akses pasar, serta belum meratanya kualitas pelayanan publik sering kali menjadi faktor penghambat dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan (Konorop 2024). Selain itu, wilayah perbatasan kerap menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu ketahanan pangan di daerah perbatasan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan produksi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan (Nathan 2025). Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah perbatasan strategis di Indonesia bagian timur memiliki potensi sumber daya alam dan sektor pertanian yang relatif besar, khususnya pada komoditas pangan primer. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan optimalisasi sistem distribusi dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Tantangan tata kelola, ketimpangan akses antarwilayah, serta belum terintegrasinya pengetahuan lokal masyarakat dengan kebijakan formal pemerintah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas ketahanan pangan daerah.

Posisi geografis Kabupaten Merauke sebagai pintu gerbang timur Indonesia menempatkannya pada peran strategis dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya dalam aspek ketahanan pangan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan Merauke tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik, ekonomi, dan sosial yang kuat. Di sisi lain, wilayah ini memiliki keragaman sosial budaya yang khas dengan keberadaan masyarakat adat yang masih mempraktikkan sistem pengelolaan pangan tradisional berbasis kearifan lokal. Sistem tersebut mencerminkan pola relasi yang erat antara manusia, lingkungan, dan sumber daya alam, sehingga berpotensi menjadi modal sosial yang signifikan dalam mendukung kebijakan pangan yang berkelanjutan apabila mampu diintegrasikan dengan tata kelola pemerintahan modern. (Rikardus 2025)

Potensi produksi pangan yang besar di Merauke belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas akses, pemerataan distribusi, serta stabilitas ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Ketimpangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pangan daerah. Kondisi ini semakin diperkuat oleh tekanan eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pangan berbasis lokal menjadi urgensi penelitian yang penting, tidak hanya sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan sistem pangan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam pengelolaan ketahanan pangan di wilayah perbatasan salah satunya terletak pada belum optimalnya koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pangan daerah. Fragmentasi kewenangan, tumpang tindih program, serta perbedaan prioritas antar instansi sering kali menyebabkan kebijakan berjalan parsial dan kurang terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas program serta lemahnya pengawasan dan evaluasi kebijakan di tingkat daerah. Di sisi lain, keterbatasan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan maupun evaluasi program pangan turut mempersempit ruang dialog antara pemerintah dan warga, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Selain persoalan koordinasi dan partisipasi, tantangan lain yang cukup mendasar adalah kurangnya integrasi antara pengetahuan lokal masyarakat dengan kebijakan formal pemerintah. Padahal, masyarakat adat dan komunitas lokal di wilayah perbatasan umumnya memiliki sistem pengelolaan pangan tradisional yang telah teruji secara turun-temurun dan adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Ketidakterhubungan antara pendekatan modern dan kearifan lokal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kebijakan serta melemahkan keberlanjutan program ketahanan pangan. Akibatnya, berbagai inisiatif yang telah dijalankan kerap bersifat jangka pendek dan belum mampu menciptakan sistem pangan yang stabil, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah perbatasan.

Tinjauan konseptual dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman mengenai good governance dalam kebijakan publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan collaborative governance menjadi relevan karena menempatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai aktor yang saling berinteraksi dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi program di tingkat lokal. Sementara itu, ketahanan pangan dipahami sebagai isu multidimensional yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan dalam jangka panjang. Perspektif multidimensional ini menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan, kondisi sosial ekonomi, serta kapasitas kelembagaan daerah.

Meskipun berbagai studi telah membahas ketahanan pangan pada level nasional maupun sektoral, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengaitkan tata kelola kolaboratif dengan konteks wilayah perbatasan. Kajian empiris yang mengintegrasikan perspektif pemerintah daerah dan komunitas lokal secara simultan juga relatif minim, sehingga belum banyak memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan pangan berbasis lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola ketahanan pangan di wilayah perbatasan, mengidentifikasi bentuk sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan pangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi penguatan tata kelola pangan daerah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian *border governance* dan *food security governance*, sekaligus memperkaya perspektif praktik kebijakan publik berbasis konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian studi kasus (case study). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam proses tata kelola ketahanan pangan, pola sinergi antar-aktor, serta dinamika kebijakan publik di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan secara komprehensif, sementara studi kasus memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial, budaya, dan administratif yang khas di daerah penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan relevan terhadap realitas tata kelola ketahanan pangan di tingkat lokal.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah perbatasan strategis di Indonesia yang memiliki potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu peran pemerintah daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan, bentuk partisipasi serta kontribusi komunitas lokal dan masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan pangan, serta pola kolaborasi antar-aktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam praktik tata kelola pangan. Penetapan lokasi dan fokus ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan interaksi kelembagaan yang memengaruhi efektivitas ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur pemerintah daerah seperti dinas yang membidangi pangan, pertanian, dan perencanaan pembangunan, serta melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan lembaga adat sebagai representasi komunitas lokal. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai peran, persepsi, strategi, serta bentuk sinergi antar-aktor dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan pada berbagai program dan aktivitas ketahanan pangan masyarakat untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tata kelola, pola partisipasi, serta dinamika interaksi sosial yang terjadi di tingkat lokal. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi kebijakan pemerintah daerah, laporan pelaksanaan program ketahanan pangan, data statistik produksi dan distribusi pangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, serta regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pangan dan pemerintahan daerah. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis, melakukan verifikasi temuan lapangan, serta memberikan konteks normatif dan historis terhadap implementasi tata kelola ketahanan pangan di wilayah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta strategi para pemangku kepentingan terkait tata kelola ketahanan pangan, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel mengikuti alur informasi yang berkembang di lapangan. Selanjutnya, observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung atau hadir dalam aktivitas yang berkaitan dengan program ketahanan pangan masyarakat guna memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik kolaborasi, pola interaksi antar-aktor, serta implementasi kebijakan secara nyata. Adapun studi dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah berbagai arsip, laporan, dan dokumen kebijakan guna melihat kesesuaian antara perencanaan tertulis dengan pelaksanaan aktual di lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama

meliputi pihak yang memiliki kewenangan, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dalam program ketahanan pangan, baik dari unsur pemerintah daerah, komunitas lokal, lembaga adat, kelompok tani, maupun organisasi masyarakat sipil. Teknik ini bertujuan memastikan data yang diperoleh bersifat mendalam dan sesuai dengan fokus kajian. Apabila dalam proses penelitian ditemukan kebutuhan informasi tambahan, maka teknik ini dapat dikembangkan menggunakan snowball sampling, yaitu peneliti memperoleh rekomendasi informan baru dari informan sebelumnya untuk menemukan aktor-aktor kunci yang memiliki pengaruh signifikan dalam tata kelola pangan daerah.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan isu tata kelola dan sinergi antar-aktor, sehingga data menjadi lebih terstruktur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, peta aktor, bagan hubungan kelembagaan, maupun narasi tematik agar memudahkan peneliti dalam membaca pola hubungan dan kecenderungan temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan disertai proses verifikasi untuk memastikan konsistensi dan ketepatan interpretasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (membandingkan data dari pemerintah, masyarakat, dan dokumen), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check kepada informan kunci guna memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dimaksud oleh para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen kebijakan terkait ketahanan pangan di Kabupaten Merauke. Analisis difokuskan pada bagaimana pola tata kelola yang dijalankan pemerintah daerah berinteraksi dengan praktik dan partisipasi komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan pangan di wilayah perbatasan. Temuan ini menggambarkan dinamika kolaborasi antar-aktor, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap kondisi ketahanan pangan masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Ketahanan Pangan

Peran pemerintah daerah dalam penguatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Merauke menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan melalui berbagai bentuk intervensi kebijakan, seperti penyediaan bantuan sarana produksi pertanian, pemberian subsidi benih dan pupuk, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas petani, serta penguatan infrastruktur pendukung distribusi pangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa upaya tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa program berjalan baik pada level perencanaan, namun dalam implementasinya masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan integrasi data lintas sektor. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam hal legitimasi kebijakan dan akses terhadap sumber daya anggaran, tetapi masih menghadapi kendala dalam menjangkau wilayah terpencil dan distrik perbatasan akibat keterbatasan infrastruktur transportasi, distribusi logistik, serta minimnya tenaga pendamping lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah telah berjalan secara struktural, namun membutuhkan penguatan aspek koordinatif dan pendekatan berbasis wilayah agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 1. Peran Pemerintah dan Komunitas Lokal dalam Ketahanan Pangan Merauke

Aspek	Temuan Hasil Penelitian	Implikasi
Peran Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah berperan melalui penyusunan kebijakan pangan, bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan kelompok tani, serta pembangunan infrastruktur distribusi.	Memperkuat ketersediaan dan akses pangan, namun efektivitas sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan jangkauan wilayah terpencil.
Kontribusi Komunitas Lokal/Masyarakat Adat	Komunitas lokal menjadi aktor utama dalam implementasi di lapangan melalui praktik kolektif dan pengetahuan lokal.	Menunjukkan bahwa keberlanjutan program lebih kuat ketika masyarakat dilibatkan secara aktif.
Praktik Kearifan Lokal	Ditemukan pola tanam tradisional yang adaptif terhadap musim, keberadaan lumbung pangan komunitas, dan budaya gotong royong dalam proses produksi dan panen.	Menjadi penopang stabilitas pangan jangka panjang dan memperkuat kemandirian komunitas.
Partisipasi dalam Perencanaan & Evaluasi	Tingkat partisipasi masyarakat bervariasi; wilayah dengan komunikasi intens antara pemerintah dan warga menunjukkan implementasi program lebih efektif.	Partisipasi publik berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan pangan.
Ketahanan Sosial Komunitas	Masyarakat memiliki mekanisme adaptif menghadapi fluktuasi harga dan ketersediaan pangan melalui solidaritas sosial dan diversifikasi sumber pangan.	Memperlihatkan bahwa kekuatan sosial budaya berperan sebagai sistem penyangga ketika intervensi formal terbatas.

Hasil penelitian dalam tabel 1 menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Merauke dibangun melalui kombinasi peran aktif pemerintah daerah dan kontribusi komunitas lokal. Pemerintah menyediakan

kebijakan, sarana produksi, pelatihan, serta infrastruktur, sementara masyarakat adat menerapkan praktik kearifan lokal seperti pola tanam tradisional, lumbung pangan, dan gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program memperkuat efektivitas kebijakan, dan mekanisme sosial komunitas membantu menghadapi fluktuasi harga serta keterbatasan pasokan. Secara keseluruhan, kolaborasi ini membentuk tata kelola pangan yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Sinergi Pemerintah dan Komunitas untuk Ketahanan Pangan

Pola sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kolaborasi yang terstruktur melalui berbagai mekanisme, seperti forum musyawarah desa, pendampingan kelompok tani, dan kemitraan program pembangunan pangan. Forum musyawarah menjadi wadah strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat adat dan arahan pemerintah, sehingga proses perencanaan dan evaluasi kebijakan lebih partisipatif. Pendampingan kelompok tani oleh aparat pemerintah dan tenaga penyuluh pertanian meningkatkan kapasitas teknis komunitas dalam pengelolaan pangan lokal, sementara kemitraan program memastikan dukungan sumber daya dan implementasi yang berkelanjutan. Intensitas komunikasi yang tinggi dan terbangunnya kepercayaan antar-aktor terbukti memperkuat koordinasi serta meminimalkan konflik kepentingan, sehingga tercipta model sinergi yang efektif. Beberapa praktik baik yang muncul di lapangan antara lain pengelolaan lumbung pangan berbasis komunitas dan program integrasi teknologi pertanian sederhana, yang berhasil meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan secara lokal, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan daerah perbatasan.

Tabel 2. aktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan / Dampak
Sumber Daya & Infrastruktur	Potensi sumber daya alam yang luas dan lahan pertanian yang subur	Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transportasi	Memungkinkan produksi pangan tinggi, tetapi akses ke pasar dan distribusi terbatas
Kebijakan & Dukungan Pemerintah	Dukungan kebijakan daerah, program pembangunan pangan, dan subsidi	Minimnya integrasi data pangan antar-instansi	Kebijakan mendukung produksi, namun koordinasi antar-instansi kurang optimal

Komunitas & Partisipasi Masyarakat	Semangat gotong royong masyarakat, keberadaan kelompok tani dan lembaga adat yang aktif	Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan komunitas di wilayah terpencil	Partisipasi masyarakat tinggi, tetapi informasi kebijakan belum merata ke seluruh desa/perbatasan
Lingkungan & Eksternal		Tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, dan risiko bencana	Kondisi eksternal memengaruhi kestabilan produksi dan ketersediaan pangan

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola ketahanan pangan di Kabupaten Merauke. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas, dukungan kebijakan daerah, semangat gotong royong masyarakat, serta keberadaan kelompok tani dan lembaga adat yang aktif. Sebaliknya, terdapat pula faktor penghambat, antara lain keterbatasan infrastruktur distribusi dan transportasi, minimnya integrasi data pangan antar-instansi, kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan komunitas di wilayah terpencil, serta tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Kombinasi faktor-faktor ini menentukan sejauh mana sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal dapat diterapkan untuk memastikan ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pangan di daerah perbatasan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal di Kabupaten Merauke terlihat melalui berbagai mekanisme yang terstruktur dan partisipatif. Forum musyawarah desa menjadi salah satu sarana utama di mana perencanaan dan evaluasi program ketahanan pangan dibahas secara terbuka antara aparat pemerintah, kelompok tani, dan tokoh masyarakat adat (Syahrudin et al. 2023). Selain itu, pendampingan teknis terhadap kelompok tani oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan secara rutin memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan praktis, mulai dari teknik budidaya hingga pengelolaan pascapanen. Bentuk kemitraan program ini juga mencakup pengadaan sarana produksi, penguatan lumbung pangan, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan bersama yang menekankan kolaborasi antar-aktor. Dari perspektif teori *collaborative governance*, kolaborasi ini memenuhi prinsip-prinsip partisipatif dan konsensus-oriented, di mana pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh pemerintah tetapi melibatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis (Tambaip, Tjilen, Riyanto, et al. 2023). Literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa keterlibatan warga secara aktif meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Dalam konteks Merauke, forum musyawarah dan pendampingan kelompok tani berfungsi sebagai wahana interaksi yang mengurangi jarak antara kebijakan formal dan praktik lapangan, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program ketahanan pangan (Tjilen et al. 2024).

Praktik-praktik terbaik yang muncul dari kolaborasi ini termasuk model lumbung pangan desa yang dikelola bersama pemerintah dan masyarakat, pemanfaatan pengetahuan lokal untuk menentukan musim tanam dan jenis tanaman yang sesuai, serta pengembangan mekanisme distribusi pangan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal merupakan kunci keberhasilan tata kelola ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Kolaborasi berbasis trust dan komunikasi

terbuka menciptakan lingkungan kondusif bagi pengambilan keputusan bersama, sementara praktik-praktik terbaik yang muncul menjadi model yang dapat direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari peran pemerintah, tetapi juga dari kemampuan untuk memberdayakan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam menjaga ketersediaan pangan.

Di Kabupaten Merauke, peran pemerintah daerah dalam tata kelola ketahanan pangan melibatkan beberapa lembaga utama, yaitu dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dan dinas perencanaan pembangunan daerah. Dinas pertanian tidak hanya menyediakan benih unggul dan sarana produksi, tetapi juga aktif membimbing kelompok tani melalui pendampingan teknis dan pelatihan inovasi budidaya. Sementara itu, dinas ketahanan pangan bertugas memastikan distribusi pangan yang merata serta mengelola cadangan pangan desa untuk mengantisipasi fluktuasi pasokan. Dinas perencanaan berperan menyelaraskan program-program ketahanan pangan ke dalam RPJMD, sehingga alokasi anggaran dan prioritas pembangunan mendukung keberlanjutan dan kesinambungan program di seluruh distrik, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat kota (Tambaip, Tjilen, Riyanto, et al. 2023). Efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah menunjukkan capaian yang beragam. Beberapa program terbukti berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilitas pasokan pangan, namun di sisi lain, koordinasi antar-OPD masih menghadapi kendala, misalnya tumpang tindih kegiatan, perbedaan prioritas, dan keterlambatan aliran informasi. Dukungan kepada komunitas lokal berupa bantuan sarana produksi dan pelatihan teknis tetap ada, tetapi sering kali implementasinya kurang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat adat atau kelompok tani di daerah perbatasan yang menghadapi tantangan geografis dan logistik yang unik (Tambaip and Tjilen 2023).

Jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*, upaya pemerintah menunjukkan langkah-langkah akuntabilitas melalui pelaporan kegiatan dan monitoring program, partisipasi melalui forum konsultasi dengan masyarakat lokal, dan transparansi dalam alokasi bantuan. Namun, tantangan nyata tetap muncul dalam hal integrasi data antar-OPD, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan fisik dan sosial yang mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Dari perspektif *policy implementation*, hal ini menegaskan bahwa penyusunan kebijakan yang baik saja tidak cukup tanpa koordinasi efektif dan adaptasi konteks lokal (Tjilen, Waas, et al. 2023). Penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan program ketahanan pangan di Merauke tidak bisa dilepaskan dari kombinasi antara peran pemerintah yang proaktif, prinsip tata kelola yang baik, dan responsivitas terhadap karakteristik lokal masyarakat. Keberhasilan intervensi pemerintah tidak hanya diukur dari output program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu membangun sinergi dengan komunitas lokal, memanfaatkan kearifan lokal, dan menanggulangi hambatan geografis maupun budaya. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan (Tjilen et al. 2022).

Masyarakat adat di Kabupaten Merauke memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan melalui praktik-praktik lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pola tanam yang menyesuaikan dengan musim, jenis tanah, dan ketersediaan air menunjukkan kemampuan adaptif komunitas dalam menghadapi kondisi iklim yang fluktuatif. Selain itu, keberadaan lumbung pangan desa dan mekanisme simpan-pinjam hasil pertanian menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama pada masa krisis atau musim paceklik (Tambaip et al. 2024). Sistem gotong royong dalam penanaman, panen, dan distribusi pangan juga memperkuat kohesi sosial dan meminimalkan risiko kerugian akibat gagal panen. Kontribusi kearifan lokal ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga strategis dalam memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan. Pengalaman dan pengetahuan masyarakat adat

memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan dan pasar, sehingga intervensi pemerintah dapat berjalan lebih efektif bila dikombinasikan dengan praktik lokal. Temuan ini selaras dengan literatur *community-based resource management*, yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan. Begitu pula, prinsip *indigenous knowledge in food security* menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan praktik yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan (Tambaip, Tjilen, Moento, et al. 2023).

Beberapa faktor mendukung keberhasilan tata kelola ketahanan pangan di Merauke. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian subur, sungai, dan hutan yang menyediakan bahan pangan lokal, menjadi basis utama. Partisipasi masyarakat yang tinggi, melalui keterlibatan dalam forum musyawarah desa, kelompok tani, dan kegiatan gotong royong, memperkuat implementasi program. Selain itu, keberadaan kelompok tani aktif dan lembaga adat yang berperan sebagai mediator antara pemerintah dan komunitas lokal memudahkan koordinasi dan pengawasan. Kombinasi sumber daya fisik, sosial, dan kelembagaan ini menunjukkan kapasitas lokal (*policy capacity*) yang memadai untuk mendukung tata kelola pangan yang efektif (Tjilen, Tambaip, et al. 2023). Di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas program. Infrastruktur yang terbatas, termasuk jalan, transportasi, dan fasilitas penyimpanan pangan, membatasi distribusi dan akses ke wilayah terpencil. Komunikasi antar-aktor seringkali tidak lancar, terutama antara pemerintah dan komunitas di desa terpencil, sehingga informasi program terkadang terlambat atau tidak sampai secara utuh. Integrasi data yang kurang memadai antar-OPD menghambat pemantauan ketersediaan pangan dan alokasi sumber daya. Selain itu, tantangan perubahan iklim, seperti curah hujan tidak menentu, banjir, dan kekeringan, menambah kompleksitas pengelolaan pangan. Temuan ini sesuai dengan teori *barriers to effective governance*, yang menunjukkan bahwa hambatan struktural, teknis, dan lingkungan dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengoptimalkan faktor pendukung sambil memitigasi hambatan yang ada. Integrasi pengetahuan lokal dengan program pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dan koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan kapasitas tata kelola pangan secara signifikan. Sebaliknya, jika hambatan infrastruktur, komunikasi, dan perubahan lingkungan tidak ditangani, efektivitas program dapat menurun, bahkan mengancam keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, strategi yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan sekaligus memaksimalkan potensi lokal dalam pengelolaan pangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Merauke sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal. Kolaborasi yang bersifat partisipatif dan mengintegrasikan kearifan lokal mampu meningkatkan ketersediaan pangan, keberlanjutan program, dan kemandirian masyarakat. Peran pemerintah melalui penyediaan sarana produksi, pelatihan, dan koordinasi antar-OPD sangat penting, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, integrasi data, dan akses ke wilayah terpencil. Selain itu, kontribusi komunitas lokal dan masyarakat adat melalui praktik tradisional, sistem gotong royong, dan pengelolaan pangan lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola pangan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat forum koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan formal dengan pengetahuan dan

praktik lokal, serta lebih aktif memberdayakan komunitas lokal dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, pengembangan sistem informasi pangan terpadu, peningkatan akses infrastruktur di wilayah terpencil, serta dukungan terhadap kelompok tani dan lembaga adat dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Konorop, Simon Yanuarius. 2024. "Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Di Tengah Tantangan Global." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1(10):8234–46.
- Mariyanto, Joko. 2025. "Krisis Global Dan Implikasinya Bagi Pertanian Indonesia: Perubahan Iklim, Konflik Geopolitik, Dan Spekulasi Pasar." *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian* 2(1):22–43.
- Muhaimin, Abdul, and Mohamad Rizky Djaba. 2025. "Islam, Ketahanan Energi Dan Pangan Serta Diskursus 'Wahabi Lingkungan' Di Indonesia." *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1(02):189–206.
- Mumpuni, Niken. 2026. "Food Security Amid Environmental Degradation: A Legal Review of Equitable Food Governance." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5(2):143–58.
- Nathan, Ivone Agustina. 2025. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan Dan Administrasi Publik Di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4):1573–91.
- Rikardus, Everistus. 2025. "Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan Dalam Peningkatan Produksi Padi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(2):302–15.
- Syahrudin, Syahrudin, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, Nur Jalal, Paul Adryani Moento, Muhammad Novan Prasetya, and Syahrudin Husein Enala. 2023. "Membangun Karakter Positif Dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Merauke." *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):95–105.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. "Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa." 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. "Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua." *Jurnal Kebijakan Publik* 14(1):101–10.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, Paul Adryani Moento, and Pulung Riyanto. 2023. "MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK." *Nusantara Hasana Journal* 2(12):98–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Higher Education Transformational Leadership in Papua: Analysis of Behavioral and Competency." *Eurasian Journal of Educational Research* 106(106):266–79.
- Tjilen, Alexander Phuk, Willyan Sahetapy, Beatus Tambaip, and Martha Betaubun. 2022. "Ecotourism Development Policy, Supporting Capacity and Development of Sustainable Tourism Facilities and Infrastructure in Raja Ampat Regency, West Papua Province." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 4(03).
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Budi Dharmawan, Adrianus Adrianus, Pulung Riyanto, and Yosephina Ohoiwutun. 2024. "Engaging Stakeholders in Policy Decision-Making for Food Security Governance: Identification, Perception, and Contribution." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 8(1):144–54. doi:10.22495/cgobrv8i1p12.

-
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Paul Adryani Moento, and Erwin Nugraha Purnama. 2023. "Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2):257–62.
- Tjilen, Alexander Phuk, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Samel Watina Ririhena, Beatus Tambaip, Syahrudin Syahrudin, Yosephina Ohoiwutun, and Riska Dwi Prihandayani. 2023. "Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2(6):38–49.